



RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON
Jl. raya bojonegara km 2 kedaleman cibeber cilegon

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2022

NOMOR : 50

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 48);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 28);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota ...

2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Cilegon.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan kegiatan berserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RKPD Tahun 2023.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Renja Dinas Kesehatan;
 - c. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - d. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. Renja Dinas Sosial;
 - i. Renja Dinas Tenaga Kerja;
 - j. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - l. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 - m. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Renja Dinas Perhubungan;
 - o. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

p. Renja ...

- p. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - q. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - r. Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - s. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - t. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Renja Sekretariat Daerah;
 - v. Renja Sekretariat DPRD;
 - w. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - x. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - y. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - z. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - aa. Renja Rumah Sakit Umum Daerah;
 - bb. Rencana Kerja Inspektorat;
 - cc. Rencana Kerja Kecamatan Jombang;
 - dd. Rencana Kerja Kecamatan Purwakarta;
 - ee. Rencana Kerja Kecamatan Cilegon;
 - ff. Rencana Kerja Kecamatan Citangkil;
 - gg. Rencana Kerja Kecamatan Grogol;
 - hh. Rencana Kerja Kecamatan Cibeber;
 - ii. Rencana Kerja Kecamatan Ciwandan; dan
 - jj. Rencana Kerja Kecamatan Pulomerak.
- (5) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB ...

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA

Pasal 4

Penyusunan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah; dan
- e. Penutup.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 19 Juli 2022

WALI KOTA CILEGON,

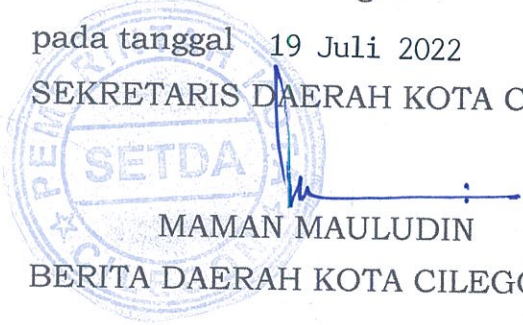
ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 19 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON



MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2022 NOMOR 50

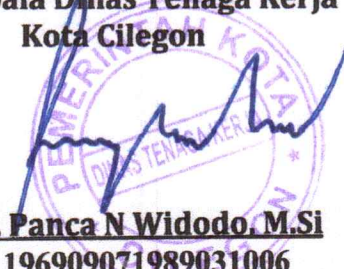
KATA PENGANTAR

Memasuki Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2016-2021, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai acuan dasar pelaksanaan tugas dengan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam rangka menciptakan *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon melalui prinsip-prinsip kinerja.

Di dalam Rencana Kerja Tahun 2023, tujuan dan sasaran ditetapkan berdasarkan kepada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon. Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon akan melaksanakan 4 (empat) Program yang terdiri dari 11 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon.

Dengan adanya Rencana Kerja Tahun 2023 ini diharapkan akan menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pokok di bidang ketenagakerjaan serta menjadi acuan dalam pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam satu tahun berjalan.

**Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Cilegon**



Drs. H. Panca N Widodo, M.Si
NIP. 196909071989031006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) 2023.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2023 menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang telah tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026. Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 dirumuskan untuk menunjang Visi, Misi Kepala Daerah Tahun 2023 dengan Program dan Kegiatan yang mengakomodir urusan Ketenagakerjaan. Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 dengan memperhatikan Program Prioritas Pemerintah Daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 7).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan

Adapun tujuan disusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kota Cilegon adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara perubahan Tahun 2023, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan / direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2023 ini disusun dengan tata urutan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rencana Kerja Perubahan, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2023.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2021 dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2023.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2023.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS TENAGA KERJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021

Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon telah mengevaluasi kinerja tahun 2021, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran telah dilaksanakan, meskipun dalam pelaksanaan masih terdapat kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan. Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon telah mengevaluasi 4 Program dan 11 Kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun 2021 sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
KEGIATAN	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
KEGIATAN	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dala 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
KEGIATAN	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota

Realisasi Kinerja dan Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja
Tahun Anggaran 2021

NO/ KODE	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (TARGET KEUANGAN)	REALISASI KINERJA (REALISASI KEUANGAN)	% KINERJA (% KEUANGAN)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		13.775.339.968,00	10.500.775.376,00	76,23%			
2.07	TENAGA KERJA		13.775.339.968,00	10.500.775.376,00	76,23%			
2.07.0.00.0.00.01	DINAS TENAGA KERJA		13.775.339.968,00	10.500.775.376,00	76,23%			
2.07.0.00.0.00.01.00	DINAS TENAGA KERJA		13.775.339.968,00	10.500.775.376,00	76,23%			
2.07.01	Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		10.080.264.755,00	7.922.872.031,00	78,60%	Untuk Indikator Kinerja (Program) secara keseluruhan tercapai targetnya, yakni Nilai Lakip Perangkat Daerah, Indekt RB dan Indeks Kepuasan Masyarakat. sedangkan Indikator Pertumbuhan Realisasi Retribusi tidak mencapai target dikarenakan asumsi awal adalah realisasi retribusi bukan pertumbuhannya sehingg target kinerja dibikin 100%	Merubah Target Kinerja Indikator (Program) Pertumbuhan Realisasi Retribusi	
2.07.01-1		Nilai Lakip Perangkat Daerah	69,02 Poin	69,02 Poin	100,00%			

2.07.01-2		Indeks RB Perangkat Daerah	53,80 Poin	50,83 Poin	94,48%			
2.07.01-3		Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)	100,00 Persen	-32,28 Persen	-32,28%			
2.07.01-4		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	65,00 Poin	84,50 Poin	130,00%			
2.07.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100,00%	100,00%			
2.07.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH		10.580.000,00	10.080.000,00	95,27%			
2.07.01.2.01.01-1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	100,00%			
2.07.01.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD		10.992.000,00	9.080.000,00	82,61%			
2.07.01.2.01.06-1		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	100,00%			
2.07.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100,00%	100,00%			

2.07.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN		6.676.524.871,00	5.176.205.997,00	77,53%	Adanya kelebihan anggaran yang terdapat pada rekening tambahan penghasilan pegawai (TPP 13 dan 14)	Penghitungan anggaran untuk gaji pegawai akan disesuaikan kembali di Tahun Anggaran 2022	
2.07.01.2.02.01-1		Jumlah Orang dan Bulan yang Terpenuhi Gajinya	14,00 Bulan	14,00 Bulan	100,00%			
2.07.01.2.02.03	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD		107.538.000,00	106.280.000,00	98,83%			
2.07.01.2.02.03-1		Jumlah Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu	12,00 Bulan	12,00 Bulan	100,00%			
2.07.01.2.02.03-2		Jumlah Materai	499,00 Lembar	499,00 Lembar	100,00%			
2.07.01.2.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD		3.455.000,00	3.275.000,00	94,79%			
2.07.01.2.02.05-1		Jumlah Dokumen Penyusunan Keuangan Akhir Tahun	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	100,00%			
2.07.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD		4.490.000,00	3.930.000,00	87,53%			

2.07.01.2.02.07-1		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun (Laporan Bulanan, Triwulanan dan Laporan Semesteran)	4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	100,00%			
2.07.01.2.02.08	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN		4.500.000,00	3.925.000,00	87,22%			
2.07.01.2.02.08-1		Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	100,00%			
2.07.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100,00%	100,00%			
2.07.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR		83.642.498,00	73.744.080,00	88,17%	Terdapat perubahan rincian pada belanja alat listrik dan elektronik (tiang pju) adanya ketidaksesuaian harga	Diusulkan di perubahan anggaran	
2.07.01.2.06.01-1		Jumlah Komponen Listrik yang Disediakan	12,00 Bulan	12,00 Bulan	100,00%			
2.07.01.2.06.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		72.103.637,00	66.103.003,00	91,68%			
2.07.01.2.06.02-1		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1.425,00 Jenis Bulan	1.425,00 Jenis Bulan	100,00%			
2.07.01.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA		30.371.135,00	27.124.247,00	89,31%			
2.07.01.2.06.03-1		Jumlah Item Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24,00 Jenis	24,00 Jenis	100,00%			
2.07.01.2.06.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR		40.613.283,00	37.866.858,00	93,24%			

2.07.01.2.06.04-1		Jumlah Penyediaan Kebutuhan Makan dan Minum	7.200,00 Orang/Hari	7.200,00 Orang/Hari	100,00%			
2.07.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		49.945.500,00	41.226.000,00	82,54%			
2.07.01.2.06.05-1		Jumlah Dokumen (Amplop Dinas)	66,00 dus	66,00 dus	100,00%			
2.07.01.2.06.05-2		Jumlah Dokumen Amplop Walikota	2,00 dus	2,00 dus	100,00%			
2.07.01.2.06.05-3		Jumlah Dokumen (Blanko Kartu Kuning (AK1)	6.200,00 lembar	6.200,00 lembar	100,00%			
2.07.01.2.06.05-4		Jumlah Dokumen (Buku Disposisi Kendali)	50,00 buku	50,00 buku	100,00%			
2.07.01.2.06.05-5		Jumlah Dokumen (Cetak Kertas Keberadaan)	500,00 lembar	500,00 lembar	100,00%			
2.07.01.2.06.05-6		Jumlah Dokumen (Cetak Map)	750,00 Lembar	750,00 Lembar	100,00%			
2.07.01.2.06.05-7		Jumlah Dokumen (Cetak Spanduk)	50,00 meter	50,00 meter	100,00%			
2.07.01.2.06.05-8		Jumlah Dokumen (Form Kartu Kuning AK2)	12,00 rim	12,00 rim	100,00%			
2.07.01.2.06.05-9		Jumlah Dokumen (Kop Walikota)	2,00 rim	2,00 rim	100,00%			
2.07.01.2.06.05-10		Jumlah Dokumen (SPJ Surat Perintah)	50,00 buku	50,00 buku	100,00%			
2.07.01.2.06.05-11		Jumlah Dokumen (SPPD Dua Muka)	1,00 rim	1,00 rim	100,00%			
2.07.01.2.06.05-12		Jumlah Dokumen yang dicetak (Kop Surat Dinas)	107,00 rim	107,00 rim	100,00%			
2.07.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		19.997.650,00	19.659.000,00	98,31%			
2.07.01.2.06.06-1		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5,00 Jenis	5,00 Jenis	100,00%			

2.07.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD		144.702.000,00	111.866.963,00	77,31%	Adanya regulasi yang mengatur terkait dengan pembatasan bepergian ke luar kota / daerah dikarenakan kondisi pandemic covid-19	Akan dianggarkan kembali di tahun 2022 untuk penunjang kegiatan kedinasan	
2.07.01.2.06.09-1		Jumlah Penyediaan Akomodasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,00 Bulan	12,00 Bulan	100,00%			
2.07.01.2.06.09-2		Jumlah Penyediaan Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,00 Bulan	12,00 Bulan	100,00%			
2.07.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100,00%	100,00%			
2.07.01.2.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA		318.932.798,00	307.728.546,00	96,49%			
2.07.01.2.07.06-1		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	56,00 Unit	56,00 Unit	100,00%			
2.07.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	93,33%	93,33%			
2.07.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		419.131.240,00	255.238.311,00	60,90%	Adanya efisiensi terhadap pemakaian listrik dan air pada Tahun 2021 dikarenakan berkurangnya kegiatan	Akan disesuaikan kembali sesuai dengan kegiatan di Tahun 2022	
2.07.01.2.08.02-1		Jumlah Pembayaran Jasa Penyediaan Listrik	12,00 Bulan	12,00 Bulan	100,00%			
2.07.01.2.08.02-2		Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi (Telepon dan Internet)	12,00 Bulan	12,00 Bulan	100,00%			

2.07.01.2.08.02-3		Jumlah Pembayaran Jasa Penyediaan Air	12,00 Bulan	12,00 Bulan	100,00%			
2.07.01.2.08.03	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		3.740.000,00	3.400.000,00	90,91%			
2.07.01.2.08.03-1		Jumlah Suku Cadang Peralatan Kantor	2,00 Buah	2,00 Buah	100,00%			
2.07.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR		1.293.115.746,00	1.237.625.407,00	95,71%			
2.07.01.2.08.04-1		Jumlah Tenaga Kebersihan dan Kemanan Kantor	216,00 OB	216,00 OB	100,00%			
2.07.01.2.08.04-2		Jumlah Pegawai Non PNS yang diberikan Asuransi Kesehatan	384,00 OB	384,00 OB	100,00%			
2.07.01.2.08.04-3		Jumlah Pegawai Non PNS yang diberikan Honor	168,00 OB	168,00 OB	100,00%			
2.07.01.2.08.04-4		Jumlah Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar yang Difasilitasi	3,00 Kegiatan	0,00 Kegiatan	0,00%			
2.07.01.2.08.04-5		Jumlah Tayang/Publikasi pada Media Promosi & Propaganda	9,00 Kali	9,00 Kali	100,00%			
2.07.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	90,83%	90,83%			
2.07.01.2.09.01	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN		134.486.500,00	73.883.261,00	54,94%	Terdapat 2 unit kendaraan jabatan ess III yang pemeliharaannya masih menjadi tanggung jawab dealer (masih garansi)	Akan disesuaikan kembali di Tahun Anggarn 2022	
2.07.01.2.09.01-1		Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	4,00 Unit	4,00 Unit	100,00%			

2.07.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN		221.624.200,00	81.848.000,00	36,93%	Terdapat 4 unit kendaraan operasional yang tidak dilakukan pemeliharaan dikarenakan sudah tidak layak pakai dan sedang dalam proses penghapusan	Penyesuaian jumlah unit kendaraan	
2.07.01.2.09.02-1		Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua yang diperlihara	10,00 Unit	10,00 Unit	100,00%			
2.07.01.2.09.02-2		Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat yang diperlihara	8,00 Unit	4,00 Unit	50,00%			
2.07.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA		234.558.900,00	83.973.000,00	35,80%	Belum adanya pihak ketiga yang memenuhi persyaratan (perijinan) terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan (mesin las, mesin digital printing, forklift, dll)	Mencari referensi terkait dengan pihak ketiga yang mempunyai persyaratan / untuk pemeliharaan mesin pelatihan	
2.07.01.2.09.06-1		Jumlah Komputer / Laptop / Printer yang dipelihara	55,00 Unit	50,00 Unit	90,91%			
2.07.01.2.09.06-2		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mesin Fotocopy / AC Split / Standing AC) yang dipelihara	50,00 Unit	45,00 Unit	90,00%			
2.07.01.2.09.06-3		Jumlah Peralatan / Mesin Pelatihan yang dipelihara	56,00 Unit	42,00 Unit	75,00%			
2.07.01.2.09.09	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA		195.219.797,00	188.809.358,00	96,72%			
2.07.01.2.09.09-1		Luas Gedung / Kantor yang dipelihara	2.406,00 Meter Persegi	2.406,00 Meter Persegi	100,00%			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		13.775.339.968,00	10.500.775.376,00	76,23%			
2.07.03	Peningkatan dukungan sarpras, kurikulum pelatihan, sertifikasi pelatihan serta pemagangan							

2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		2.905.225.020,00	2.085.428.786,00	71,78%	1. Adanya kesalahan kode rekening pada output sub kegiatan pelatihan crane dan scaffolding, 2. keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan, 3. Kuota Untuk kegiatan pelatihan Security tidak sesuai dengan standar minimal kuota di POLDA	Kegiatan pelatihan crane, scaffolding, dan security akan dilaksanakan ditahun 2022. mengatasi kekurangan sarpras melakukan kerjasama dengan BBPLK Serang meskipun belum maksimal.	Membuat angket perusahaan untuk mengetahui kebutuhan pelatihan perusahaan,
2.07.03-1		Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	50,00 Persen	55,77 Persen	111,54%			
2.07.03.2.01	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100%	83,33%	83,33%			
2.07.03.2.01.01	PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASER KOMPETENSI		2.905.225.020,00	2.085.428.786,00	71,78%	1. Adanya kesalahan kode rekening pada output sub kegiatan pelatihan crane dan scaffolding, 2. keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan, 3. Kuota Untuk kegiatan pelatihan Security tidak sesuai dengan standar minimal kuota di POLDA	Kegiatan pelatihan crane, scaffolding, dan security akan dilaksanakan ditahun 2022	Membuat angket perusahaan untuk mengetahui kebutuhan pelatihan perusahaan,
2.07.03.2.01.01-1		Terlaksananya sertifikasi profesi	20,00 Orang	20,00 Orang	100,00%			
2.07.03.2.01.01-2		Terlaksananya Pelatihan Alat Berat	20,00 orang	20,00 orang	100,00%			
2.07.03.2.01.01-3		Terlaksananya Pelatihan Bordir	20,00 orang	20,00 orang	100,00%			
2.07.03.2.01.01-4		Terlaksananya Pelatihan Forklift	80,00 orang	80,00 orang	100,00%			
2.07.03.2.01.01-5		Terlaksananya Pelatihan Komputer	20,00 orang	20,00 orang	100,00%			

2.07.03.2.01.01-6		Terlaksananya Pelatihan Las SMAW	20,00 orang	20,00 orang	100,00%			
2.07.03.2.01.01-7		Terlaksananya Pelatihan Listrik	20,00 orang	20,00 orang	100,00%			
2.07.03.2.01.01-8		Terlaksananya Pelatihan Menjahit	20,00 orang	20,00 orang	100,00%			
2.07.03.2.01.01-9		Terlaksananya Pelatihan Otomotif	20,00 orang	20,00 orang	100,00%			
2.07.03.2.01.01-10		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Dalam Bidang Usaha Mandiri (Pelatihan tata boga & Pelatihan tata rias)	40,00 orang	40,00 orang	100,00%			
2.07.03.2.01.01-11		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Security	20,00 orang	0,00 orang	0,00%			
2.07.03.2.01.01-12		Pengiriman Peserta pendidikan dan pelatihan teknisi kimia D1 AMC	40,00 Orang	40,00 Orang	100,00%			
2.07.03.2.01.01-13		Terlaksananya Pelatihan Las SMAW 6G	20,00 Orang	20,00 Orang	100,00%			
2.07.03.2.01.01-14		Terlaksananya sertifikasi lisensi operator forklift	80,00 orang	80,00 orang	100,00%			
2.07.03.2.01.01-15		Terlaksananya sertifikasi lisensi operator alat berat	20,00 orang	20,00 orang	100,00%			
2.07.03.2.01.01-16		Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi operator crane	20,00 orang	0,00 orang	0,00%			
2.07.03.2.01.01-17		Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi operator scaffolding	20,00 orang	0,00 orang	0,00%			
2.07.03.2.01.01-18		Terlaksananya Pelatihan Cleaning Service	43,00 Orang	43,00 Orang	100,00%			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		13.775.339.968,00	10.500.775.376,00	76,23%			
2.07.04	Peningkatan kualitas layanan informasi ketenagakerjaan							

2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		323.806.366,00	129.488.341,00	39,99%	1. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan lowongan yang tersedia hal tersebut disebabkan industri di Cilegon adalah industri padat modal dan high tech, sehingga kebutuhan tenaga kerjanya berbeda dengan industri padat karya yang membutuhkan karyawan yang cukup banyak. 2. Masih adanya perusahaan yang tidak / belum melaporkan lowongan pekerjaan ke disnaker	1. Menciptakan tenaga kerja yang kompeten dengan membuat program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri di cilegon 2. Mengadakan sosialisasi mekanisme penempatan tenaga kerja 3. Membuat program pemagangan lulusan pelatihan Latihan kerja ke perusahaan yang ada di kota cilegon 4. Memonitoring lowongan dan penempatan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di kota cilegon 5. Mengadakan job fair mini atau fasilitasi penempatan tenaga kerja	Kegiatan ini menjawab rekomendasi DPRD point 4, dan point 5
2.07.04-1		Persentase Penempatan Tenaga Kerja	30,00 Persen	16,55 Persen	55,17%			
2.07.04.2.01	PELAYANAN ANTARKERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,00%	100,00%			

2.07.04.2.01.02	PELAYANAN ANTAR KERJA		162.910.107,00	116.077.132,00	71,25%	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Secara Kinerja Sudah Dilaksanakan, namun untuk Realisasi anggaran hanya tercapai Rp. 98.700.000 atau 71, 25% dikarenakan: 1. Kesalahan rincian/volume belanja di SIPD 2. Belanja insentif yang tidak terserap semua karena target PAD tidak tercapai karena dr bulan November s/d desember disnaker tidak bisa memvalidasi perpanjangan TKA karena harus merubah PERDA.	1. Percepatan pembuatan perda TKA agar target PAD dapat tercapai 2. Perbaikan rincian / volume blanja	
2.07.04.2.01.02-1		Jumlah Peserta Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja	30,00 Perusahaan	30,00 Perusahaan	100,00%			
2.07.04.2.01.02-2		Jumlah Perusahaan Peserta Pembinaan dan Monitoring Penggunaan TKA	30,00 perusahaan	30,00 perusahaan	100,00%			
2.07.04.2.01.02-3		Jumlah Peserta Pemagangan Lulusan BLK	45,00 orang	45,00 orang	100,00%			
2.07.04.2.01.02-4		Jumlah Peserta Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja	10,00 bursa kerja khusus	10,00 bursa kerja khusus	100,00%			
2.07.04.2.01.02-5		Jumlah Pegawai non PNS yang diberikan Insentif Retribusi IMTA	32,00 Orang	32,00 Orang	100,00%			
2.07.04.2.01.03	PENYULUHAN DAN BIMBINGAN JABATAN BAGI PENCARI KERJA		0,00	0,00	100,00%	Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan dilaksanakan di sekolah-sekolah, dimana ketentuan kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara online, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.	Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan dialihkan kegiatan lain.	
2.07.04.2.03	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100%	100,00%	100,00%			

2.07.04.2.03.02	PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE		58.438.502,00	6.351.970,00	10,87%	Secara Kinerja Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Sudah Dilaksanakan, namun Untuk Serapan anggaran hanya tercapai Rp. 6.351.970 atau 10.87% dikarenakan: 1. Kesalahan pada rincian/volume belanja di SIPD sehingga pelaksanaan yang dilaksanakan sebelum ABT atau TW1 s/d TW 3 tidak dapat di cairkan.	Didalam penginputan SIPD akan lebih hati-hati agar volume kegiatan sesuai dengan perencanaan	Kegiatan ini menjawab rekomendasi DPRD point 4, dan point 5
2.07.04.2.03.02-1		Jumlah Perusahaan yang Dimonitoring	30,00 Perusahaan	30,00 Perusahaan	100,00%			
2.07.04.2.03.03	JOB FAIR/BURSA KERJA		27.470.239,00	7.059.239,00	25,70%	1. Kesalahan pada rincian/volume belanja di SIPD sehingga pelaksanaan yang dilaksanakan sebelum ABT atau TW1 s/d TW 3 tidak dapat di cairkan. 2. Pelaksanaan job fair/ fasilitasi penempatan terlaksana 6 perusahaan dari target 10 perusahaan karena banyak perusahaan yang melaksanakan rekrutmen di perusahaan / secara online	Untuk mengatasi permasalahan: 1. memperbaiki dan memastikan tidak ada nya kesalahan rincian / volume belanja, agar anggaran dapat terealisasi dan menghimbau agar perusahaan dalam melakukan rekrutmen dapat menggunakan tempat / fasilitas di disnaker	Kegiatan ini menjawab rekomendasi DPRD point 4, dan point 5
2.07.04.2.03.03-1		Jumlah Perusahaan Peserta Pameran Bursa Kerja / Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja	10,00 perusahaan	10,00 perusahaan	100,00%			

2.07.04.2.04	PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100%	0,00%	0,00%			
2.07.04.2.04.02	PENYEDIAAN LAYANAN TERPADU PADA CALON PEKERJA MIGRAN		74.987.518,00	0,00	0,00%	Dengan adanya surat edaran dari KEMENDAGRI Nomor 47 tahun 2021 terkait dengan PPKM Level 1, Level 2, Level 3 tidak diperbolehkan untuk berkumpul atau mengumpulkan orang. Sehingga kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan, dikarenakan kita mengikuti perintah surat himbauan dari KEMENDAGRI	Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan Daring atau Zoom Meeting. Itupun harus mendapatkan ijin dari SATGAS COVID dan UPD terkait	Kegiatan ini menjawab rekomendasi DPRD point 4, dan point 5
2.07.04.2.04.02-1		Terlaksananya Sosialisasi TKI Ke Luar Negeri	300,00 Orang	0,00 Orang	0,00%			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		13.775.339.968,00	10.500.775.376,00	76,23%			
2.07.05	Peningkatan kualitas hubungan industrial							
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		466.043.827,00	362.986.218,00	77,89%	Program Hubungan Industrial memiliki indikator persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama. dari 20 kasus yang tercatat, ada 9 kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama, sedangkan 7 kasus anjuran dan 4 kasus dalam proses penyelesaian, tidak tercapainya target target dikarenakan berubahnya aturan baru tentang omnibuslaw sehingga menyebabkan perbedaan penafsiran terhadap aturan baru tersebut dan kurang pahami pihak perusahaan dan pekerja terhadap aturan baru tersebut	Memberikan sosialisasi terhadap aturan baru (omnibuslaw) kepada pihak perusahaan dan pihak pekerja	

2.07.05-1		Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	80,00 Persen	45,00 Persen	56,25%			
2.07.05.2.01	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,00%	100,00%			
2.07.05.2.01.01	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN		19.133.218,00	12.243.218,00	63,99%	Secara kinerja sub kegiatan pengesahan peraturan bagi perusahaan dengan output sosialisasi pembinaan persyaratan kerja telah dilaksanakan, namun dari realisasi anggaran sebesar Rp. 12.243.218 dari pagu anggaran Rp. 19.133.218, tidak sepenuhnya serapan anggaran dikarenakan efisiensi anggaran makanan dan minuman.		
2.07.05.2.01.01-1		Jumlah Peserta pembinaan persyaratan kerja	100,00 Orang	100,00 Orang	100,00%			

2.07.05.2.02	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100%	44,44%	44,44%			
2.07.05.2.02.01	PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA		397.604.609,00	332.543.000,00	83,64%	Sub kegiatan ini memiliki pagu sebesar Rp. 397.604.609 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 332.543.000, yang memiliki 3 output, dari ketiga output hanya perumusan umk yang dilaksanakan, sedangkan sosialisasi PPHI dan Upah kerja tidak terlaksana dikarenakan sulitnya pihak perusahaan memberikan ijin ke karyawan untuk datang diacara sosialisasi di masa pandemi Covid-19.	dilaksanakan monitoring kepihak perusahaan	
2.07.05.2.02.01-1		Jumlah dokumen perumusan UMK dan UMSK	1,00 dokumen	1,00 dokumen	100,00%			
2.07.05.2.02.01-2		Jumlah peserta sosialisasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	50,00 orang	0,00 orang	0,00%			
2.07.05.2.02.01-3		Jumlah peserta sosialisasi upah kerja	50,00 peserta	0,00 peserta	0,00%			
2.07.05.2.02.02	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA		24.844.000,00	18.200.000,00	73,26%	Secara kinerja penanganan demo / mogok kerja terlaksana, namun dari serapan anggaran hanya terealisasi sebesar Rp. 18.200.000 dari pagu Rp. 24.844.000, tidak maksimalnya serapan anggaran dikarenakan berkurangnya aksi demo / mogok kerja pada tahun 2021 karena izin dari pihak kepolisian tidak		

						dikeluarkan		
2.07.05.2.02.02-1		Jumlah penanganan pekerja atau buruh demo/unjuk rasa	280,00 orang	280,00 orang	100,00%			
2.07.05.2.02.04	PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA		24.462.000,00	0,00	0,00%	Belum ada kesepakatan pergantian kepengurusan LKS tripartit Tahun 2021 - 2024	Membuat kesepakatan kepengurusan LKS Tripartit Tahun 2021 - 2024	
2.07.05.2.02.04-1		Jumlah kegiatan perumusan kebijakan ketenagakerjaan	1,00 kegiatan	0,00 kegiatan	0,00%			

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, pada tabel 2.1 dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, untuk realisasi kinerja program pada tahun 2021 diperoleh nilai Lakip sebesar 69,02 poin dengan capaian kinerja 100%. Untuk indikator Indeks RB diperoleh nilai sebesar 50,83 Poin dengan capaian 94,5%. Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh nilai sebesar 97,65% dengan capaian kinerja 130%. Pertumbuhan Realisasi Retribusi diperoleh nilai -32,28% dari target 100%, terdapat kesalahan saat awal penentuan target pertumbuhan retribusi dimana asumsi awal adalah realisasi retribusi bukan pertumbuhan realisasi retribusi sehingga target awal ditentukan sebesar 100%.
2. Untuk Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja realisasi kinerja nya sebesar 55% dari target yang ditetapkan 50%, sehingga capaiannya sebesar 111,5%. Realisasi tersebut diperoleh dari perbandingan pencari kerja (peserta pelatihan) yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 478 orang pada tahun 2021 terhadap jumlah peserta yang ikut seleksi sebanyak 857 orang.
3. Program Penempatan Tenaga Kerja yang memiliki indikator “persentase penempatan tenaga kerja” pada tahun 2021 memiliki target 30%, dimana realisasi nya sebesar 16,55% dengan capaian kinerja 55,17%, realisasi kinerja program tersebuty diperoleh dari data penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta penempatan pemagangan yang berjumlah 1324 orang terhadap jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 8108 orang.
4. Program Hubungan Industrial memiliki indikator program yaitu “persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama”. Pada tahun 2021 ditetapkan target sebesar 80%, dimana realisasi kinerjanya sebesar 45% sehingga capaiannya 56%. Nilai tersebut diperoleh dari data perselisihan yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja sebanyak 20 kasus dan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama yakni 9 kasus dan yang anjuran 7 kasus serta ada 4 kasus yang belum selesai.

Secara umum capaian target kinerja dan anggaran yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon pada tahun 2021 pada umumnya cukup baik, namun terdapat program / kegiatan yang belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu Program Pelayanan antar kerja yang beberapa kegiatan / sub kegiatannya tidak dapat dilaksanakan di tahun 2021, hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam program / kegiatan pada tahun mendatang.

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Pendapatan
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

TAHUN 2020			TAHUN 2021		
TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
6.000.000.000	7.750.089.476	129,17%	4.000.000.000	5.858.816.200	146,5%

Dari Tabel 2.2 di atas, dapat diketahui realisasi anggaran untuk pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 6.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.750.089.476,- dengan capaian 129,17%.

Sedangkan pada tahun 2020 Pendapatan dari Retribusi IMTA ditargetkan Rp. 4.000.000.000,- dan terealisasi Rp. 5.858.816.200 dengan capaian 146,5%.

Pada Tahun anggaran 2023 retribusi perpanjangan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ditargetkan sebesar Rp. 4.000.000.000,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang ketenagakerjaan, meskipun sebagai organisasi pelaksana urusan non pelayanan dasar. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab bagi keberhasilan pembangunan di Kota Cilegon dalam rangka pencapaian Visi Misi Kepala Daerah periode 2021 – 2026.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon

NO	SASARAN	INDIKTOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan profesionalitas aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	69,02	69,02	100%
		Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	53,80	50,83	94,5%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	65	84,50	130%
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi	%	100	-32,28	-32,28%
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	%	30	16,55	55,17%

Dari tabel di atas, terdapat dua sasaran strategis yang terbagi dalam 5 indikator, di mana sasaran strategis “meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalisme aparatur” memenuhi target yang ditetapkan dengan kriteria penilaian kinerja tinggi. Sedangkan sasaran strategis “Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat” masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sasaran strategis tersebut memiliki indikator tingkat penempatan tenaga kerja yang didukung oleh program dan kegiatan penempatan dan pemagangan menghasilkan realisasi kinerja 16,55% dari target 30% dengan capaian 55,17%. Data tersebut diambil dari perbandingan jumlah data tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri serta pemagangan dengan total 1342 orang terhadap pencari kerja terdaftar sebanyak 8108 orang.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penduduk dan Tenaga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan proses pembangunan disamping sumber daya lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu krusialnya posisi tenaga kerja didalam proses pembangunan sehingga permasalahan ketenagakerjaan harus mendapatkan perhatian yang menyeluruh dan terpadu dari berbagai pihak.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dapat disimpulkan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan kemampuan pencari kerja
2. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia
3. Meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrail

Strategi pencapaian tujuan organisasi dapat ditempuh melalui

1. Meningkatkan keahlian, keterampilan pencari kerja melalui program pelatihan
2. Meningkatkan kesempatan kerja terutama di sektor informal
3. Mengembangkan sistem informasi pasar kerja
4. Meningkatkan kecepatan penyelesaian ketenagakerjaan dan pencegahan kasus ketenagakerjaan melalui peningkatan pembinaan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan RKPD Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2023, sebagian besar telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan serta proses penyusunan rancangan awal telah mengikuti mekanisme partisipatif. Review terhadap rancangan RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIANKINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA				26.033.024.526					24.070.668.658	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disnaker	Nilai Lakip Perangkat Daerah Indeks RB Perangkat Daerah Pertumbuhan Realisasi Retribusi Indeks Kepuasan Masyarakat	70,75 57,8 100 69	9.971.635.212	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disnaker	Nilai Lakip Perangkat Daerah Indeks RB Perangkat Daerah Pertumbuhan Realisasi Retribusi Indeks Kepuasan Masyarakat	70,75 57,8 100 69	30.270.991	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	33.297.104	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	15.952.454	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	17.547.180	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	15.952.454	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja yang disusun	1 Laporan	15.749.924	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja yang disusun	1 Laporan	14.318.537	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.148.592.419	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.213.705.419	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org Bulan	6.988.421.324	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org Bulan	6.099.708.531	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	150.670.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	105.360.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.401.075	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.001.096	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	5.009.220	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	4.635.792	

Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	374.213.041	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	346.904.341	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	87.296.593	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.622.888	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	48.965.509	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	22.727.945	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.241.048	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.947.678	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.455.890	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	13.636.767	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	149.675.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	94.630.400	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	70.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	57.740.000	
Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang disediakan	18 Unit	70.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang disediakan	18 Unit	20.000.000	
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor bangunan lainnya yang disediakan	-	-	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	37.740.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.732.222.031	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.860.240.483	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	400.994.960	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	400.994.960	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.331.227.071	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.459.245.523	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	557.571.609	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	555.268.609	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	128.377.277	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	173.328.277	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	211.556.634	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	181.650.634
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	211.556.634	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	99.880.924
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.408.774	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.408.774
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	65%	11.253.838.839	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	65%	11.218.838.839
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100%		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100%	11.218.838.839
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Usulan Langsung Masyarakat / Lembaga)	800 orang 135 orang	5.642.600.060	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Usulan Langsung Masyarakat / Lembaga)	696 orang 130 orang	4.776.769.060
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	5.611.238.779	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	6.442.069.779
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	30%	3.835.455.070	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	30#	3.424.176.820
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.736.817.860	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.231.768.652
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AK	2000 orang	3.736.817.860	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AK	2000 orang	3.134.607.447
Penyuluhan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	-		Penyuluhan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300 orang	97.161.205
Pengelolaan Informasi pasar kerja	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan infomrasi pasar kerja	100%	70.000.000	Pengelolaan Informasi pasar kerja	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan infomrasi pasar kerja	100%	124.786.100
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	150 perusahaan 8000 orang	70.000.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	150 perusahaan 8000 orang	94.240.000
Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-	-	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 orang	30.546.100

Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penerbitan Perpanjangann IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	28.637.210	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penerbitan Perpanjangann IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	67.622.068	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pegawai Non PNS yang diberikan Insentif Retribusi IMTA	36 orang	28.637.210	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pegawai Non PNS yang diberikan Insentif Retribusi IMTA	36 orang	67.622.068	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	80%	400.440.392	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	80%	400.440.392	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100%	400.440.392	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100%	400.440.392	
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	333.620.232	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	333.620.232	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 Perkara	33.410.080	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 Perkara	33.410.080	
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	33.410.080	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	33.410.080	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten / Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Pada forum Organisasi Perangkat Daerah terdapat beberapa usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dari kelompok masyarakat maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Cilegon. Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon pada tahun 2022 telah melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon pada tahun 2023. Penentuan usulan program dan kegiatan yang diterima berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan.

Rincian usulan masyarakat / reses dprd dan tindaklanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah.

Tabel 2.5
Usulan Reses DPRD

No	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Lokasi	OPD yang Dituju	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Berkarya	Tenaga Kerja	Fasilitasi Rekrutmen Calon Tenaga Kerja Lokal oleh Disnaker agar terserap di Pabrik-Pabrik Industri yang ada di kota cilegon	Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM untuk Persiapan Penyaluran Tenaga Kerja Pada Industri/ Badan Usaha wilayah Grogol dan Pulomerak	Pulomerak	Dinas Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja
2	Gerindra	Tenaga Kerja	Fasilitasi Rekrutmen Calon Tenaga Kerja Lokal oleh Disnaker agar terserap di Pabrik-Pabrik Industri yang ada di kota cilegon	Pelatihan Rias Pengantin	Citangkil	Dinas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
3	Gerindra	Tenaga Kerja	Fasilitasi Rekrutmen Calon Tenaga Kerja Lokal oleh Disnaker agar terserap di Pabrik-Pabrik Industri yang ada di kota cilegon	Pelatihan Mengelas	Ciwandan	Dinas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
4	Berkarya	Tenaga Kerja	Fasilitasi Rekrutmen Calon Tenaga Kerja Lokal oleh Disnaker agar terserap di Pabrik-Pabrik Industri yang ada di kota cilegon	Penyediaan peluang lapangan pekerjaan bagi pemuda, dengan cara memberikan prioritas khusus kepada pemuda sekitar pabrik/perusahaan pada saat melakukan rekrutmen pekerja	Seluruh Kecamatan	Dinas Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja
5	Gerindra	Tenaga Kerja	Fasilitasi Rekrutmen Calon Tenaga Kerja Lokal oleh Disnaker agar terserap di Pabrik-Pabrik Industri yang ada di kota cilegon	Pelatihan Bahasa dan Mekanik untuk mengurangi tingkat pengangguran	Ciwandan	Dinas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
6	PDIP	Tenaga Kerja	Fasilitasi Rekrutmen Calon Tenaga Kerja Lokal oleh Disnaker agar terserap di Pabrik-Pabrik Industri yang ada di kota cilegon	Perluasan kesempatan kerja dan semakin tingginya tingkat pengangguran	Seluruh Kecamatan	Dinas Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam upaya mencapai keberhasilan Pembangunan di Kota Cilegon, maka diperlukan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sinergi tersebut dilakukan melalui penyesuaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Cilegon dengan strategi pencapaian agenda prioritas Pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Banten. Dimana Prioritas Pembangunan Kota Cilegon seperti tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026, salah satunya adalah Mewujudkan Kesejahteraan yang Merata, dengan sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat melalui Program Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, yang merupakan upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka. Pelaksanaan Program ini difokuskan pada aspek peningkatan kompetensi tenaga kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja dan layanan ketenagakerjaan.

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon adalah :

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Layanan Pemerintahan
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan telaah Kebijakan Nasional dan Provinsi, serta berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, maka ditetapkan tujuan strategis rencana kerja perangkat daerah tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon adalah “Peningkatan Layanan Pemerintahan” dan “Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat”.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran-sasaran Renja Perangkat Daerah tahun 2021 sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesional aparatur
2. Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat

Adapun target dari kinerja tujuan dan sasaran selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan layanan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	62,97 (B)	71,2 (BB)	75,3 (BB)	78 (BB)	82,2 (A)	84,2 (A)
			Nilai Lakip Perangkat Daerah	69,02 (Poin)	70,02 (Poin)	70,75 (Poin)	71,75 (Poin)	72,75 (Poin)	73 (Poin)
			Indeks RB Perangkat Daerah	53,80 (Poin)	55,80 (Poin)	57,8 (Poin)	60 (Poin)	62 (Poin)	64 (Poin)
			Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	65 (Poin)	67 (Poin)	69 (Poin)	70 (Poin)	72 (Poin)	74 (Poin)
2	Pemerataan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Pengangguran Terbuka	11,9%	11,16%	10,46%	9,81%	9,19%	8,62%
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	30%	30%	30%	30%	30%	30%

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan dan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 mengacu pada visi dan misi Walikota Cilegon serta tujuan dan sasaran RPJMD Kota Cilegon 2021-2026 dan tujuan serta sasaran RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026. Secara umum Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Melaksanakan 4 program, 11 kegiatan dan 31 sub kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH
- Sub Kegiatan :Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
- Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
- Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan rumahtangga
- Sub Kegiatan : Penyediaan bahan logistikkantor
- Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
- Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd

KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
- Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel
- Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
KEGIATAN : PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI
- Sub Kegiatan : Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
- Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
KEGIATAN : PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA
- Sub Kegiatan : Pelayanan antar kerja
- Sub Kegiatan : Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja
KEGIATAN : PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA
- Sub Kegiatan : Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online
- Sub Kegiatan : Job Fair / Bursa Kerja (Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja)
KEGIATAN : PENERBITAN PERPANJANGAN IMTA YANG LOKASI KERJA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
KEGIATAN : PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA
- Sub Kegiatan : Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- Sub Kegiatan : Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota

Program Prioritas pembangunan tahun 2021 – 2026 merupakan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2021- 2026. Adapun Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu upaya dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka sesuai dengan permendagri nomor 90 tahun 2019 yaitu:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah serta mendukung Program Prioritas Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon pada tahun 2023 mengusulkan 4 Program yang terbagi menjadi 11 Kegiatan. Dari 4 Program tersebut, yang masuk dalam Program Prioritas Daerah adalah Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Program Penempatan Tenaga Kerja. Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2023 sebagaimana disajikan pada bab 3.

Program kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan akan dilaksanakan semaksimal mungkin dengan mengoptimalkan peran sumber daya aparatur, sarana prasarana yang ada, serta dukungan anggaran yang tersedia. Adapun rencana alokasi anggaran untuk Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah:

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									24.070.668.630
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									9.027.212.579
2	07	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									30.270.991
2	07	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Capaian kinerja kegiatan pada kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	70,75 Poin	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	15.952.454	
2	07	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian kinerja kegiatan pada kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	70,75 Poin	1 Laporan	100 %	14.318.537	
2	07	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									6.213.705.419
2	07	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	70,75 Poin	30 Orang/bulan	100 %	6.099.708.531	
2	07	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian kinerja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	70,75 Poin	12 Dokumen	100 %	105.360.000	

2	07	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Capaian kinerja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	70,75 Poin	1 Laporan	100 %	4.001.096
2	07	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian kinerja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	70,75 Poin	2 Laporan	100 %	4.635.792
2	07	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								309.987.077
2	07	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	69,00 Poin	1 Paket	100 %	41.622.888
2	07	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	69,00 Poin	1 Paket	100 %	48.965.509
2	07	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah		69,00 Poin	1 Paket	100 %	22.727.945
2	07	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	69,00 Poin	1 Paket	100 %	42.947.678
2	07	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah		69,00 Poin	1 Paket	100 %	45.455.890

2	07	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah		69,00 Poin	12 Dokumen	100 %	13.636.767
2	07	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	69,00 Poin	12 Laporan	100 %	94.630.400
2	07	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								57.740.000
2	07	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian kinerja kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	70,75 Poin	3 Unit	100 %	20.000.000
2	07	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	70,75 Poin	4 Unit	100 %	37.740.000
2	07	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.860.240.483
2	07	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	capaian kinerja kegiatan penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	69,00 Poin	12 Laporan	100 %	400.994.960
2	07	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	capaian kinerja kegiatan penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	69,00 Poin	12 Laporan	100 %	1.459.245.523

2	07	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								555.268.609
2	07	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	70,75 Poin	4 Unit	100 %	173.328.277
2	07	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian kinerja kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	70,75 Poin	18 Unit	100 %	181.650.634
2	07	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian kinerja kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		70,75 Poin	0 Unit 50 Unit	100 %	99.880.924
2	07	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	70,75 Poin	1 Unit	100 %	100.408.774

2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								11.218.838.839
2	07	03	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								11.218.838.839
2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Usulan Langsung Masyarakat / Lembaga)	Capaian kinerja kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	0 Orang 696 Orang 130 Orang	100 %	4.776.769.060
2	07	03	2,01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Capaian kinerja kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	65 %	1 Unit	100 %	6.442.069.779
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								3.424.176.820
2	07	04	2,01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota								3.231.768.652
2	07	04	2,01	02	Pelayanan antar Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Capaian kinerja kegiatan Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten / kota	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 % Pertahun	2000 Orang	100 %	3.134.607.447
2	07	04	2,01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Capaian kinerja kegiatan Pelayanan antar kerja di daerah	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	30 % Pertahun	300 Orang	100 %	97.161.205

									kabupaten / kota					
2	07	04	2,03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja									124.786.100
2	07	04	2,03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Capaian Kinerja kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	150 Perusaha 8000 Orang	an 100 %		94.240.000
2	07	04	2,03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Capaian Kinerja kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja		30 %	50 Orang	100 %		30.546.100
2	07	04	2,05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									67.622.068
2	07	04	2,05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Pegawai Non PNS yang diberikan Insentif Retribusi IMTA	Capaian kinerja kegiatan Penerbitan Perpanjangann IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 % Pertahun	0 36 Orang	100 %		67.622.068
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL									400.440.392
2	07	05	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota									400.440.392
2	07	05	2,02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Capaian Kinerja kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	20 Perkara	100 %		333.620.232

					(Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					
2	07	05	2,02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Capaian Kinerja kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	20 Perkara	100 %	33.410.080
2	07	05	2,02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Capaian Kinerja kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Lembaga	100 %	33.410.080
TOTAL													24.070.668.630

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2023 disusun sebagai pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021-2026. Selain menjadi acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan selama Tahun 2023 yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat / Provinsi yang dilaksanakan di daerah, Renja Dinas Tenaga Kerja berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja / Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2023 diharapkan dapat terwujud perencanaan yang berkualitas sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mewujudkan *Good Governance*.

Keberhasilan pelaksanaan/realisasi Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2023 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Tenaga Kerja. Diharapkan semua elemen kelembagaan Dinas Tenaga Kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Demikian dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2023 ini disusun dan diharapkan mampu mengkomunikasikan secara berkelanjutan antara semua pelaku pembangunan dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Cilegon, Juli 2022
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Cilegon


Drs. H. Panca N Widodo, M.Si
NIP. 196909071989031006